

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS: JALAN SLAMET RIADI KOTA SAMARINDA)

Mina Susilawati¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk resistensi pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah deskriptif – kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab resistensi disebabkan oleh faktor lokasi yang merupakan area terlarang bagi pedagang kaki lima tersebut dirasa cukup strategis untuk melakukan kegiatan perdagangan. Faktor lainnya adalah karena ketidakadilan, pedagang menganggap petugas Satpol PP tidak melakukan penertiban secara adil dan merata. Resistensi yang dilakukan pedagang di kawasan tersebut adalah bentuk resistensi terselubung dengan melalui beberapa cara, yaitu menolak relokasi, berpura-pura patuh, dan memanfaatkan jaringan sosial. Dalam resistensi ini tidak ada kekacauan, demonstrasi, pembakaran, ataupun kekerasan secara terbuka. Pedagang sangat paham jika mereka tidak dapat mengubah peraturan yang telah ada, tidak ada pilihan lain selain menyesuaikan diri sebaik mungkin dan berhati-hati jika masih ingin tetap menikmati keuntungan-keuntungan kecil di tengah tekanan yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan Pemerintah Kota Samarinda sebelum merelokasi dapat melibatkan pedagang kaki lima dan mempertimbangkan keinginan pedagang dalam menentukan lokasi berdagang.

Kata Kunci : Resistensi, Pedagang Kaki Lima.

Pendahuluan

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat hingga menimbulkan berbagai permasalahan. Lajunya pertumbuhan jumlah penduduk diperkotaan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tumbuh dan kembangnya pembangunan suatu perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia tidak selalu disebabkan oleh faktor kelahiran ataupun kematian tetapi juga disebabkan oleh faktor urbanisasi. Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap tingginya pertumbuhan penduduk di suatu kota. Perkotaan akan menjadi magnet bagi masyarakat untuk

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: minasusilawati@gmail.com

berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini yang disebut dengan urbanisasi.

Perkembangan jumlah penduduk perkotaan terus meningkat berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Dalam kurun waktu 5 tahun antara 2015-2020 diprediksi tingkat urbanisasi meningkat dari 53,3% menjadi 56,7% dan diproyeksikan menjadi 66,6% pada 2035 (news.detik.com). Urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena disisi lain kota juga belum siap untuk menampung pendatang yang setiap waktu selalu bertambah banyak serta belum ada pengendalian didalamnya. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi, akhirnya menimbulkan fenomena urbanisasi berlebih. Salah satu masalah yang terjadi akibat dari urbanisasi berlebih yaitu ketidakmampuan sektor formal menyerap semua tenaga kerja para pendatang yang terus meningkat, serta kurangnya pendidikan, keahlian dan keterampilan yang mereka miliki sering kali membuat mereka masuk kedalam bidang sektor informal agar bisa terus bertahan hidup di perkotaan.

Berdasarkan BPS Kalimantan Timur bahwa pada Februari 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.899.900 orang, meningkat sebanyak 84.640 orang dibanding angkatan kerja pada Februari 2018. Dapat dilihat setiap tahunnya jumlah angkatan kerja semakin tinggi, sedangkan serapan tenaga kerja di sektor formal sangat terbatas (kaltim.bps.go.id. Diakses pada 26 November 2019).

Masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal terpaksa harus beralih ke sektor informal. Mengingat sektor informal ini cukup mudah untuk dimasuki, karena tidak membutuhkan syarat khusus untuk masuk berusaha dan memiliki kapasitas luar biasa dalam menampung setiap penambahan jumlah tenaga kerja baru.

Sektor informal dicirikan sebagai produsen barang serta berkecimpung dalam kegiatan bisnis, transportasi dan penyediaan jasa (Sumarti, syaukat dan Nuryana, 2003: 17). Sektor informal yang paling banyak diminati masyarakat perkotaan adalah pedagang kaki lima. Jumlah pedagang kaki lima yang mencapai 25,1 juta orang di seluruh Tanah Air merupakan potensi besar untuk membangkitkan perekonomian nasional (economy.okezone.com). Pedagang kaki lima merupakan kelompok sektor informal yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan jenis sektor informal lainnya, karena kemampuannya yang tetap bertahan pada saat kondisi ekonomi sedang terpuruk.

Di Kota Samarinda khususnya, usaha pedagang kaki lima menjadi salah satu alternatif usaha yang bisa dijalankan dalam rangka mendapatkan kesejahteraan hidup rumah tangga mereka. Usaha ini telah menjadi pilihan karena relatif tidak membutuhkan modal yang banyak dan tidak membutuhkan keterampilan khusus, selain itu cukup mudah di jalankan.

Pedagang kaki lima biasa berada di lokasi-lokasi fasilitas umum yang ramai seperti daerah perkantoran, daerah hiburan/wisata, daerah dekat universitas, maupun sarana publik lainnya. Ada beberapa lokasi pedagang kaki lima di Kota Samarinda yang dapat kita temui diantaranya Pasar pagi, Jalan Cendana, Jalan Gajah Mada, Jalan Slamet Riadi, dan lain-lain. Jenis barang jualan yang dijual para pedagang di kawasan tersebut diantaranya adalah buah-buahan, makanan dan minuman cepat saji, mainan anak dan lainnya.

Kegiatan perekonomian ini tidak berjalan dengan baik, para pedagang kaki lima kerap kali harus terpaksa tidak berjualan karena ada Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melakukan penertiban. Aktivitas penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya berlandaskan pada Perda Kota Samarinda No.19 tahun 2001, yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Samarinda, Perda tersebut intinya berisikan yaitu untuk mengatur dan membina pedagang kaki lima agar berjualan di tempat yang telah di sediakan yang tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Salah satunya pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi yang harus berhadapan dengan situasi penertiban atau razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena pedagang tersebut telah berjualan di area taman kota atau kawasan yang bukan di peruntukkan bagi pedagang kaki lima. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim, Gede Yusa mengatakan lahan di sepanjang Tepian Mahakam adalah ruang terbuka hijau. Status itu membuat Taman Tepian Mahakam atau Taman Islamic lebih di utamakan untuk kegiatan masyarakat (<http://kaltim.prokal>). Jika ada pedagang yang terkena razia oleh petugas Satpol PP, maka gerobak dan barang jualan mereka akan di sita dan di bawa ke kantor Satpol PP Kota Samarinda untuk di tindak lanjuti. Pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi yang berjualan di badan jalan, diatas saluran drainase maupun di taman kota hanya bisa pasrah rombongan dagangannya di angkut Satpol PP Kota Samarinda (Tribun Kaltim, 18 Juli 2018).

Demi memenuhi kebutuhan hidup, pedagang kaki lima tersebut melakukan segala macam bentuk pertahanan ataupun resistensi agar tetap dapat mengais rezeki di kawasan Jalan Slamet Riadi. Resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan. Contohnya, berpura-pura patuh, menggerutu, menolak relokasi, bersembunyi, dan lainnya.

Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah adanya penertiban, begitu petugas pergi, maka pedagang kaki lima datang dan melakukan aktivitas kembali pada keesokan harinya seperti sedia kala saat kondisi dirasa aman. Pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatannya pasti menginginkan rasa aman dan nyaman seperti yang di harapkan. Namun, semakin banyaknya keberadaan pedagang kaki lima tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kota.

Pedagang kaki lima dalam visi instansi itu adalah pengusaha tangguh yang harus di hargai. Jika pedagang kaki lima diarahkan dan dibina serta diberdayakan, dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat besar. Pada penelitian ini saya memilih Jalan Slamet Riadi sebagai lokasi penelitian, Karena kawasan ini sering terjadi operasi ketertiban umum yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan merupakan lokasi yang cukup strategis bagi pedagang kaki lima karena letaknya di tengah-tengah keramaian kota.

Masalah ini penting untuk diteliti, karena telah terjadi dilema dalam hal keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Disatu sisi keberadaannya juga di butuhkan oleh sebagian masyarakat. Hanya saja, disisi lain keberadaannya mengganggu kebersihan, dan keindahan kota. Situasi seperti ini sebenarnya merupakan alternatif tersendiri bagi para pendatang atau masyarakat golongan bawah, karena sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan kehidupan ekonomi perkotaan.

Kerangka Dasar Teori

Teori Resistensi James C. Scott

Konsep resistensi yang dipakai James C. Scott adalah resistensi sehari-hari (every day forms of resistance), yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi secara terus-menerus antar petani dan orang-orang yang berusaha menarik tenaga kerja, makanan, pajak sewa dan keuntungan dari mereka. Kebanyakan perlawanan jenis ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh orang yang tidak berdaya, menipu, berpura-pura patuh, mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, mengumpat di belakang, melakukan sabotase dan seterusnya. (Scott, 2000: 40)

Di dalam bukunya *Weapons of the Weak*, James C. Scott menguraikan betapa akibat meluasnya peranan negara dalam proses transformasi pedesaan melalui Revolusi Hijau, telah mengubah hubungan antara petani kaya dengan petani miskin, dimana yang kaya mejadi semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin, bahkan menjadi lebih miskin. Perubahan ini melahirkan berbagai bentuk perlawanan kaum lemah dalam menghadapi hegemoni kaum kaya maupun negara. Scott menunjukkan betapa petani miskin mampu membangun perlawanan terhadap hegemoni negara, lewat penetrasi negara di dalam proses transformasi hubungan-hubungan produksi dengan mekanisasi dan modernisasi pertanian, dengan menyebutkan realitas itu sebagai *everyday forms of repression* yang di hadapi dengan *everyday forms of resistance* (James C. Scott:1985, 241). James C. Scott membagi resistensi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Resistensi terselubung (simbolis atau ideologis) yaitu, berpura-pura patuh, pura-pura tidak tahu, melakukan sabotase, menipu, mengumpat di belakang, membakar, penolakan terhadap kategori-kategori yang di paksakan kepada masyarakat serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.

Menurut Scott (2000), bentuk resistensi ini muncul karena masyarakat tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku yang bersifat eksploitatif dan tidak adil.

2. Resistensi terbuka (protes sosial atau demonstrasi) merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (*violent*) seperti pemberontakan. Menurut Scott (2000), resistensi terbuka ini mempunyai dampak-dampak yang revolusioner. Tujuannya adalah berusaha meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri.

Sektor informal

Istilah sektor informal pertama kali di lontarkan oleh Keith Hart (1991), dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di pasar tenaga yang terorganisasi. Agar tetap dapat bertahan hidup (*survive*), para migran yang tinggal di kota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan yang tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Menurut Bremen yang dikutip Rusli Ramli (1992: 74) menyatakan, bahwa sektor informal merupakan suatu pekerjaan yang umumnya padat karya, kurang memperoleh dukungan dan pengakuan dari pemerintah juga kurang terorganisir dengan baik.

Sementara itu Bremen (dalam Manning, 1991) menyatakan bahwa:

“Sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dari segi produksi secara ekonomi telah begitu menguntungkan, meskipun mereka menunjang kehidupan bagi penduduk yang terbelenggu kemiskinan”.

Mengenai struktur informal ini, Bremen (dalam Manning, 1991) menambahkan bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup dalam istilah “usaha sendiri”, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit di cacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya yang tidak terikat dan tidak terampil, serta golongan-golongan lain dengan pendapatan rendah dan tidak tetap, hidupnya serba susah dan semi kriminal dalam batas-batas perekonomian kota.

Dalam konteks, sektor-sektor informal kota menjadi primadona bagi kaum migran yang ingin mengadu nasib. Tetapi pada umumnya, ada ruang yang dipenuhi oleh kaum migran dan kelompok marginal. Kondisi sosial ekonomi tetap melingkari nasib terpuruk kalangan level bawah. Hal tersebut disebabkan karena upah, penghasilan, kemampuan, profesionalisme dan produktifitas rendah, cepat atau lambat, berdampak pada peningkatan penduduk warga, tetapi kota-kota besar pada umumnya lebih pesat pertumbuhannya dibanding tempat-tempat urban yang lebih kecil.

Sektor informal kehadirannya tidak dikehendaki dalam pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari pembangunan

sektor formal. Tetapi sektor informal jelas berbeda dengan sifat, ciri khas sektor formal. Sifat-sifat sektor informal yang mencerminkan adanya pertentangan dengan sektor formal antara lain : a) dari sisi pemasaran, transaksi tawar menawar diluar sistem hukum formal dengan aktivitas sosial budaya. b) perilaku sosial pelaku berhubungan erat dengan daerah asal. c) merupakan kegiatan ilegal, sehingga selalu terancam penertiban atau penggusuran. d) pendapat para pelaku ekonomi sektor ini, sah tetapi disembunyikan. e) secara umum dipandang melakukan peran peripheral dalam ekonomi kota dan beraneka ragam kegiatan. f) dalam menjalankan usaha terjadi persaingan ketat diantara pelaku ekonomi di dalam masyarakat untuk memperebutkan posisi kompetitor ini.

Berbagai dinamika pertumbuhan kota di negara berkembang seringkali muncul disertai terjadinya arus migrasi penduduk dari desa ke kota, sebagai akibat dari situasi dan kondisi desa yang sulit, lahan pertanian sempit, sedang fasilitas di kota lebih menarik, karena ada lapangan kerja.

Dengan demikian, sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran di perkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di perkotaan.

Sementara itu Breman (dalam Manning, 1991) menyatakan bahwa: “Sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dari segi produksi secara ekonomi telah begitu menguntungkan, meskipun mereka menunjang kehidupan bagi penduduk yang terbelenggu kemiskinan”.

Mengenai struktur informal ini, Breman (dalam Manning, 1991) menambahkan bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup dalam istilah “usaha sendiri”, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit di cacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya yang tidak terikat dan tidak terampil, serta golongan-golongan lain dengan pendapatan rendah dan tidak tetap, hidupnya serba susah dan semi kriminal dalam batas-batas perekonomian kota.

Dalam konteks, sektor-sektor informal kota menjadi primadona bagi kaum migran yang ingin mengadu nasib. Tetapi pada umumnya, ada ruang yang dipenuhi oleh kaum migran dan kelompok marginal. Kondisi sosial ekonomi tetap melingkari nasib terpuruk kalangan level bawah. Hal tersebut disebabkan karena upah, penghasilan, kemampuan, profesionalisme dan produkifitas rendah, cepat atau lambat, berdampak pada peningkatan penduduk warga, tetapi kota-kota besar pada umumnya lebih pesat pertumbuhannya dibanding tempat-tempat urban yang lebih kecil.

Sektor informal kehadirannya tidak dikehendaki dalam pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari pembangunan sektor formal. Tetapi sektor informal jelas berbeda dengan sifat, ciri khas sektor

formal. Sifat-sifat sektor informal yang mencerminkan adanya pertentangan dengan sektor formal antara lain : a) dari sisi pemasaran, transaksi tawar menawar diluar sistem hukum formal dengan aktivitas sosial budaya. b) perilaku sosial pelaku berhubungan erat dengan daerah asal. c) merupakan kegiatan illegal, sehingga selalu terancam penertiban atau pengusuran. d) pendapat para pelaku ekonomi sektor ini, sah tetapi disembunyikan. e) secara umum dipandang melakukan peran peripheral dalam ekonomi kota dan beraneka ragam kegiatan. f) dalam menjalankan usaha terjadi persaingan ketat diantara pelaku ekonomi di dalam masyarakat untuk memperebutkan posisi kompetitor ini.

Berbagai dinamika pertumbuhan kota di negara berkembang seringkali muncul disertai terjadinya arus migrasi penduduk dari desa ke kota, sebagai akibat dari situasi dan kondisi desa yang sulit, lahan pertanian sempit, sedang fasilitas di kota lebih menarik, karena ada lapangan kerja.

Dengan demikian, sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran di perkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di perkotaan.

Pedagang Kaki Lima

Definisi pedagang kaki lima Menurut Karafir dalam Ali dan Syamsu Alam (2012:186): “Bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper toko dan pasar pasar tanpa izin usaha dari pemerintah”. Bertolak dari pernyataan tersebut bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum dan tidak mendapat izin dari pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang kaki lima mengganggu kenyamanan pengguna kota atau kawasan karena melakukan kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum sehingga dilakukan penanganan dan penertiban yang khusus ke tempat – tempat yang selayaknya untuk para sektor informal khususnya di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Melalui penelitian deskriptif ini, penulis ingin membuat gambaran kondisi secara menyeluruh tentang resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemilihan lokasi di Jalan Slamet Riadi, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang. Alasan dalam pemilihan lokasi ini karena di Jalan Slamet Riadi masih banyak dijumpai para pedagang kaki lima yang masih berjualan setelah terjadinya penertiban.

Dalam penelitian mengenai Resistensi Pedagang Kaki di Jalan Slamet Riadi Kota Samarinda maka peneliti memfokuskan sebagai berikut :

1. Menggambarkan dan menganalisis strategi resistensi secara terselubung oleh pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi.
2. Faktor penyebab pedagang kaki lima melakukan resistensi terselubung di Jalan Slamet Riadi.

Hasil Penelitian

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Resistensi Terselubung

Lokasi Strategis

Bagi pedagang tentu saja lokasi yang strategis dan memiliki akses yang mudah untuk dilewati berbagai jenis kendaraan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Hal ini terungkap dari pernyataan salah satu pedagang kaki lima yang mengungkapkan :

”lokasi disini cukup strategis karena berada ditengah-tengah kota dan cukup dekat dengan kegiatan masyarakat”. Ungkap Bapak SD (Wawancara,09 Januari 2020)

Menurut Bapak Yosua Laden (Kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Samarinda) pedagang kaki lima sudah pasti mendekati diri dengan keramaian, fenomena ini terjadi karena pedagang kaki lima dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Hal ini terungkap dari pernyataan Bapak Yosua Laden yang mengatakan:

“PKL pasti maunya secara cepat dan mudah terhubung dengan pembeli. apalagi di kawasan ini bersisian dengan Sungai Mahakam yang saat ini menjadi destinasi wisata sebagian masyarakat, Slamet Riadi merupakan salah satu jalan utama yang pasti ramai dilalui masyarakat, dan juga kawasan ini dekat dengan kegiatan masyarakat seperti tempat ibadah, dan lainnya”. (Wawancara, 09/01/2020)

Dengan memilih lokasi yang banyak dilalui orang, maka akan membuka peluang pengunjung yang datang semakin banyak. Pedagang juga sangat paham bahwa dalam menjalankan usaha banyak hal yang harus dipertimbangkan, jangan sampai usaha yang mereka jalankan berhenti ditengah jalan karena lokasi yang kurang tepat dan pastinya akan sepi pengunjung.

Informan Ibu AN mengatakan :

“Saya bertahan disini karena perputarannya yang lumayan cepat, jadi cepat juga balik modal, disini rame pengunjung apalagi kalau hari libur”. (Wawancara,09/01/2020)

Bapak HF mengatakan jika selama berjualan di lokasi ini hanya membutuhkan modal yang kecil dengan keuntungan yang cukup besar, Hal ini terungkap dari pernyataan informan yang mengungkapkan :

“Usaha dengan produk semacam ini merupakan usaha perputaran uang yang cepat mba, biarpun untungnya (laba) yang saya dapat relatif kecil per-hari nya, tetapi karena produk yang dijual ini dibutuhkan apalagi dengan harga terjangkau, asal laku terus pasti akan menghasilkan hasil yang lumayan juga”. (Wawancara,09/01/2020)

Selain karena lokasi yang cukup strategis, salah satu pedagang mengaku tidak mampu untuk menyewa kios atau tempat lain untuk berjualan.

“Mau nyewa tempat atau bangun toko saya belum mampu, modal kami saja kecil”. Ungkap Ibu SR (Wawancara,09/01/2020)

Hal ini membuat pedagang melakukan segala cara agar tetap dapat berdagang dikawasan terlarang tersebut.

Ketidakadilan

Pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi mengatakan Pemerintah Kota tebang pilih dalam melaksanakan aturan, pedagang merasa penertiban tidak dilakukan secara merata. Seperti yang dikatakan oleh Bapak HF, salah satu pedagang kaki lima di kawasan Jalan Slamet Riadi dalam wawancara dengan peneliti.

“Kenapa hanya disini yang sering ditertibkan? Padahal yang berjualan di depan Kantor Gubernur dan di Jalan Cendana sudah sangat jelas mengganggu dan menimbulkan kemacetan, seharusnya disana ditertibkan juga” (Wawancara, 23/12/2019).

Perlakuan yang tidak sama ini membuat kelompok pedagang kaki lima di kawasan Slamet Riadi merasa sangat kecewa terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang juga dianggap setengah-setengah bekerja.

“Tolong untuk Satpol PP ataupun Pemerintah Kota, jangan hanya disini yang terus kena sasaran razia. Seharusnya bisa tegas dan adil dong,” ungkap Ibu SR (Wawancara, 23/12/2019).

Pedagang merasa sudah seharusnya Pemkot Samarinda dapat tegas dan melakukan penertiban kepada seluruh pedagang yang memakai badan jalan, trotoar ataupun taman kota. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu AN.

“Kalau mau ditertibkan silahkan saja. Asal semuanya ditertibkan,” (Wawancara, 23/12/2019).

Selain itu, pedagang kaki lima juga sangat kecewa karena dianggap sebagai akar dari kekacauan kota. Padahal pedagang merasa telah berupaya untuk menjaga kebersihan di area sekitar tempat mereka selama ini untuk berdagang.

“Padahal kami berjualan disini tidak menutup akses pejalan kaki, kami juga tidak meninggalkan peralatan untuk berjualan maupun sampah disini,” ungkap Bapak SD (Wawancara, 23/12/2019).

Menurut para petugas Satpol PP mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai penindak saja. penertiban merupakan bentuk ketegasan yang dilakukan

terhadap pedagang yang tidak mentaati aturan. Hal ini terungkap dari pernyataan Bapak Yosua Laden yang mengatakan :

“Pihak kami telah beberapa kali memberikan imbauan, peringatan, dan teguran kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di kawasan tersebut tetapi diabaikan saja”. (Wawancara, 09/01/2020)

Dalam hal ini pedagang menganggap pemerintah lebih memperhatikan pada persoalan memperindah tata ruang kota, dibanding memikirkan tentang nasib pedagang kaki lima.

Bentuk Resistensi Terselubung

Berjualan kembali ditempat semula

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan pedagang kaki lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima. Akan tetapi pedagang kembali berjualan ditempat sebelumnya walaupun sudah ditempatkan di lokasi yang baru. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yosua Laden (Kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Samarinda).

“Untuk pedagang kaki lima di kawasan Jalan Slamet Riadi terutama di Taman Islamic, sebenarnya sudah diberikan tempat relokasi tepatnya di samping Masjid Darunni’mah yang masih berada di Jalan Slamet Riadi. Tetapi, pedagang kaki lima di kawasan tersebut masih saja kembali berjualan di tempat semula” (Wawancara, 09/01/2020).

Alasan pedagang menolak relokasi karena tempat relokasi yang dipilih oleh pemerintah cenderung kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima, pedagang pernah mencoba untuk berdagang di lokasi pemindahan yang dipilih pemerintah tetapi hasilnya penurunan daya beli yang didapat. Hal ini ditegaskan oleh Bapak SD salah satu pedagang di Jalan Slamet Riadi.

“Saya pernah jualan di tempat relokasi yang ditunjuk, tapi pengunjungnya enggak terlalu rame seperti disini” (Wawancara, 23/12/2019).

Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan ditempati sepi pengunjung, dan tentu saja bila hal itu terjadi maka para pedagang tidak mendapatkan penghasilan yang cukup.

“Seharusnya ada solusi yang lebih tepat, setidaknya tetap di izinkan berjualan disini dan kami siap ditata oleh pemerintah agar rapi,” tutur Bapak HF (Wawancara, 23/12/2019).

Bertahannya pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi, tentu saja untuk memenuhi kehidupan sehari hari.

“Ya mau gimana lagi? Kalau tidak jualan disini, saya mau jualan dimana? di tempat lain kurang laku. Sedangkan saya harus membiayai kebutuhan di rumah,” ungkap Ibu SR (Wawancara, 23/12/2019).

Selain itu pedagang merasa khawatir akan kehilangan pelanggan jika direlokasi ke tempat lain. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu AN.

“Saya sangat tidak setuju harus pindah, pelanggan saya nanti kabur mereka malas lagi jalan kesana nya,” (Wawancara, 23/12/2019).

Pedagang sudah pasti cukup lelah dengan keadaan seperti ini, seperti bermain petak umpet bersama Satpol PP. Hingga saat ini belum ditemukan jalan keluar agar pedagang dapat berjualan dengan nyaman tanpa khawatir harus ditertibkan.

Meskipun beberapa pedagang secara hukum sadar melakukan kesalahan, karena telah menempati lahan milik pemerintah kota dan terpaksa melanggar aturan. Selain karena demi memenuhi keperluan sehari-hari juga karena tidak memiliki modal untuk menyewa kios di pasar. Selain itu, pedagang kemungkinan besar akan kehilangan pelanggannya. Beberapa kemungkinan tersebut merupakan alasan para pedagang kaki lima melakukan penolakan dipindah ke lokasi yang baru.

Berpura-pura Patuh

Saat aparat meminta para pedagang kaki lima di kawasan Jalan Slamet Riadi untuk pindah ditempat relokasi ataupun membubarkan diri, para pedagang seolah-olah menyetujui perintah tersebut dan berjanji tidak mengulanginya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yosua Laden yang mengatakan :

“Sampai sekarang pedagang kaki lima dikawasan ini belum ada melakukan kekerasan kepada pihak Satpol PP saat akan ditertibkan. Dan perlu diketahui jika ada yang menghalangi tugas Satpol PP berarti telah melanggar hukum”. (Wawancara, 09/01/2020)

Kepura-puraan ini merupakan strategi pedagang, sekaligus senjata guna mencapai suatu tujuan dan kepentingan bagi pedagang kaki lima. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak SD.

“Kalau saya, apa yang dibilang petugas iya iya saja. Saya tidak bisa juga melawan, saya sadar jualan disini emang salah. Walaupun gitu besok-besoknya setelah penertiban pasti saya kembali berjualan lagi disini,” (Wawancara, 23/12/2019).

Pedagang kaki lima di area tersebut sangat memanfaatkan celah sekecil apapun. Ketika sudah tidak ada Satpol PP yang berjaga, mereka kembali membuka lapak dagangan saat kondisi dirasa sudah aman.

“Waktu penertiban kan bubar karena disuruh sama petugas, tapi setelah itu ya saya jualan lagi disini kalau petugas sudah tidak ada,” ungkap Ibu AN (Wawancara, 23/12/2019).

Pedagang hanya bisa pasrah jika diminta untuk mengosongkan lahan, karena pedagang tidak ingin membuat keributan dengan petugas. Bila keributan itu

terjadi, sudah pasti akan membuat mereka mengalami kerugian. Seperti yang diungkapkan Ibu SR.

“Kalau ngelawan malah repot, saya takut barang dagangan disita sama petugas.” (Wawancara, 24/12/2019).

“Daripada dibongkar paksa dan barang disita petugas, saya sih mending bongkar sendiri aja,” ungkap pula Bapak HF (Wawancara, 24/12/2019).

Pedagang merespon dengan patuh terhadap peraturan hanya pada saat diawasi saja. Demi kelanjutan hidupnya, pedagang kaki lima dikawasan tersebut Hal tersebut dilakukan sudah pasti karena pedagang lebih memilih bersikap aman demi kelanjutan hidupnya.

Memanfaatkan Jaringan Sosial

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar pedagang kaki lima memiliki jaringan sosial dengan sesama pedagang, hubungan teman satu profesi dan suatu organisasi. Pernyataan ini sesuai dengan Bapak Yosua Laden yang mengatakan :

“Pedagang kaki lima di kawasan tepian ini memang memiliki suatu organisasi, organisasi yang menaungi PKL Tepian ini salah satunya adalah IPTM (Ikatan Pedagang Tepian Mahakam). Biasanya pedagang mengutus sejumlah pengurus IPTM untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan pengaduan secara langsung kepada wakil rakyat di Samarinda terkait nasib para pedagang kaki lima yang mencakup area tepian”. (Wawancara, 09/01/2020)

Hal ini dibenarkan oleh Ibu AN yang mengatakan :

“Hadirnya IPTM ini menurut saya sangat memfasilitasi interaksi yang baik antara PKL dan pemerintah demi memperjuangkan nasib kami sebagai pedagang di kawasan tepian”. (Wawancara, 24/12/2019)

Selain menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah, asosiasi ini juga memberikan kemudahan kepada pedagang dalam mendapatkan suatu informasi. Terbentuknya organisasi tersebut, maka besar harapan pedagang untuk dapat mengubah kondisi mereka menjadi lebih baik dan sejahtera.

Dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya pedagang kaki lima dikawasan ini juga memanfaatkan hubungan pertemanan sesama profesi. Hal ini dilihat dari kerjasama yang mereka bina. Apabila salah satu pedagang meninggalkan lapaknya untuk menjalankan ibadah sholat, maka teman satu profesinya membantu menjaga atau menjualkan barang jika ada pelanggan yang berniat membeli di lapak tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak SD :

“kalau saya mau pergi sholat atau ke toilet sebentar biasanya saya titip sama teman disebelah yang juga jualan disini”. (Wawancara, 24/12/2019)

Selain itu, apabila terdapat situasi yang dirasa terancam seperti akan adanya penertiban atau razia, maka pedagang yang telah mendapatkan informasi tersebut

akan menyebarkan informasi ke rekan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu SR dan Bapak HF yang mengatakan :

“Biasanya kalau mau ada razia dikasih tau sama teman yang lain, jadi bisa beresin dagangan sebelum petugas datang”. (Wawancara, 09/01/2020)

Dalam hal ini, maka dapat dilihat bahwa kemampuan dalam menyambung relasi-relasi antar individu dan kelompok yang berbeda identitas asal adalah salah satu kekuatan jaringan sosial.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penertiban di kawasan Jalan Slamet Riadi merupakan penyebab resistensi dibangkitkan. Pedagang kaki lima di kawasan tersebut tidak memiliki legalisasi dan izin usaha resmi langsung dari Pemerintah Daerah, sehingga pedagang selalu merasa was-was jika akan terjadinya penertiban ataupun penggusuran karena kawasan tersebut merupakan fasilitas umum.

Lokasinya yang juga sangat berdekatan dengan salah satu Ikon Kalimantan Timur yaitu, Masjid Islamic Center (Masjid Baitul Muttaqin) dan Jalan Slamet Riadi juga merupakan jalan utama yang sering dilalui, sehingga kerap kali dilaksanakan penertiban agar tidak terlihat kesan kumuh di area sekitar tersebut. Selain itu adapun faktor lainnya yang melatarbelakangi resistensi pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi, yaitu faktor ketidakadilan dan faktor lokasi yang dirasa cukup strategis bagi pedagang untuk melakukan kegiatan jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi secara langsung ditemukan fakta bahwa resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi adalah bentuk resistensi yang terselubung. Di dalam resistensi ini tidak ada kekacauan, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial yang terorganisasi, ataupun kekerasan secara terbuka. Pedagang tidak melakukan pemberontakan secara besar-besaran, semata-mata untuk mencari aman dan menghindari kerugian dan masalah yang semakin panjang dengan para petugas Satpol PP yang bisa saja menyebabkan mereka tidak dapat berdagang kembali.

Resistensi terselubung yang dilakukan pedagang kaki lima di Jalan Slamet Riadi ada 3 (tiga) cara yaitu, 1) menolak relokasi dengan tetap berjualan kembali, 2) berpura-pura patuh, 3) memanfaatkan jaringan sosial.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda, sebelum merelokasi diharapkan dapat melibatkan pedagang kaki lima dan mempertimbangkan keinginan pedagang dalam menentukan lokasi berdagang.
2. Bagi pedagang kaki lima, diharapkan disiplin menjaga kebersihan dengan baik serta mentaati semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan hendaknya mau pindah ke tempat relokasi yang telah ditentukan oleh

pemerintah. Dengan adanya peraturan yang dibuat, akan mempermudah baik bagi pemerintah maupun pedagang kaki lima dalam menjembatani antara keinginan pemerintah, dengan kemauan pedagang kaki lima sehingga tercipta keharmonisan, keamanan bagi semua kalangan.

3. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melakukan penertiban hendaknya bertindak adil dan melakukan penertiban secara merata, bukan hanya sebagian pedagang kaki lima saja yang ditertibkan agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi pedagang yang lain.

Daftar Pustaka

- Ali Faried, Syamsu adi Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, 2012, Refika Aditama
- Chris Manning, Tadjuddin Noer Effendi, Penyunting (1991), Urbanisasi, SPengangguran dan Sektor Informal di Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hart, Keith. 1991. Sektor Informal dan Struktur Pekerjaan di Kota. disunting oleh Manning, dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. PPSK Universitas Gadjah Mada Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Ramli, Rusli, 1992, "*Sektor Informal Perkotaan : Pedagang Kaki Lima*", Ind-Hill, Co, Jakarta.
- Scott, B. 1985. Strategi dan Teknik Organisasi. Diterjemahkan : Asparsayogi, A. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Scott, James C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor. Edisi Pertama
- _____.2000. Senjatanya Orang-Orang yang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.